

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pertanggungjawaban atau keadaan yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Akuntabilitas menurut Mardiasmo, dalam Aminuddin Ilmar didefinisikan sebagai suatu kewajiban mempertanggungjawabkan kegagalan ataupun kesuksesan pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang sebelumnya telah direncanakan.¹

Guna keefisiensi lembaga sektor publik, organisasi ini mendapat tekanan yang lebih dalam memperkirakan biaya sosial, ekonomi, juga pengaruh buruk terhadap aktivitas yang dilaksanakan. Akuntansi sektor publik mulanya adalah kegiatan yang terspesialisasi dari sebuah profesi yang lebih kecil. Tetapi sekarang akuntansi sektor publik terjadi perubahan menjadi disiplin ilmu yang keberadaannya lebih dan diperlukan dan substansial.² Akuntabilitas adalah konsep yang ada pada organisasi layanan publik, yang mana masih diminati dalam kompleksitas, implikasi, dan sejarahnya. Akuntabilitas memiliki arti mengaudit maupun mengurus, melaksanakan tanggung jawab, laporan kinerja, menjawab terhadap tindakan dan perilaku yang sudah dilaksanakan, tindakan dan keputusan, terbuka dalam pemeriksaan yang adil.³

Akuntabilitas pengelolaan dana desa ditujukan untuk langkah dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena akan berhubungan dengan

¹Aminuddin Ilmar, *Kepemerintahan Yang Bertanggungjawab: Melalui Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pemerintah* (Makassar: Phinatama media, 2020), 3.

²Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018), 1-2.

³Saifatul Husna and Syukriy Abdullah, "Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Beberapa Desa Di Kabupaten Pidie)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEIKA) Universitas Syiah Kuala* Vol.1 No.1 (2016): 286.

bagaimana organisasi pemerintah mampu dan dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan pemerintah desa khususnya dalam penggunaan anggaran dengan sebaik-baiknya melalui pemberian pelayanan kepada masyarakat.⁴ Prinsip dalam *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Teori keagenan menganggap pemerintah desa menjadi agen untuk masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan kesadaran penuh untuk kepentingan pribadi dan menganggap pemerintah desa tidak dapat dipercaya untuk bertindak sewajarnya bagi kepentingan publik. *Agency theory* menyebutkan bahwa banyak terdapat *information asymmetry* diantara pihak *agent* (pemerintah) yang memiliki akses langsung pada informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Munculnya *information asymmetry* membuka peluang adanya masalah akuntabilitas pada pengelolaan dana desa.⁵

Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yakni akuntabilitas vertikal (pertanggungjawaban pada otoritas yang lebih tinggi) dan akuntabilitas horizontal (pertanggungjawaban kepada masyarakat luas). Indikator nilai-nilai dasar akuntabilitas diantaranya:

- 1) Kepemimpinan: Pimpinan memberikan contoh kepada individu lain, terdapat komitmen yang baik saat melaksanakan pekerjaan.
- 2) Transparansi: Dengan memberikan informasi secara terbuka sangat mendukung adanya akuntabilitas.
- 3) Integritas: Tidak pernah melanggar dan melakukan penyelewengan terhadap peraturan dan hukum yang ada.
- 4) Responsibilitas: Kewajiban untuk masing-masing lembaga ataupun seseorang bahwa adanya konsekuensi tertentu dari setiap tindakan yang sudah

⁴ Aminuddin Ilmar, *Kepemerintahan Yang Bertanggungjawab: Melalui Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pemerintah* (Makassar: Phinatama media, 2020), 4.

⁵ Arniwita et al., *Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi* (Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021):28.

- dilaksanakan, sebab ada tuntutan agar bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah ditentukan.
- 5) Keadilan: keadaan kebenaran ideal secara moral terkait suatu hal.
 - 6) Kepercayaan: Rasa percaya akan tumbuh apabila terdapat suatu keadilan.
 - 7) Keseimbangan: Jumlah sumber daya manusia di imbangi dengan kemampuan yang dimiliki agar mencapai akuntabilitas.
 - 8) Kejelasan: Memahami peran, tanggung jawab, tujuan dan kinerja yang diinginkan organisasi, maupun sistem laporan kinerja.
 - 9) Konsisten: Membantu dalam menciptakan lingkungan yang akuntabel dengan memastikan konsistensi.⁶

b. Pengelolaan Dana Desa

Berlandaskan Permendagri No. 20 Tahun 2018, keuangan desa dikelola sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan tertib anggaran. Jangka waktu dalam pengelolaan keuangan desa adalah 1 tahun anggaran terhitung dari tanggal 1 Januari-31 Desember. Pemerintah desa diwajibkan menyampaikan informasi APBDes dengan terbuka pada masyarakat.⁷

Anggaran menurut KBBI yaitu sebagai perhitungan, perkiraan, taksiran atau aturan terkait pengeluaran maupun penerimaan kas yang dikehendaki bagi periode mendatang yang dinyatakan menggunakan angka, umumnya dalam satuan uang. Sujarweni menyebutkan akan manfaat anggaran desa, diantaranya sebagai berikut⁸:

- 1) Untuk acuan guna menetapkan strategi aktivitas operasional melalui pengamatan ketersediaan dan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat.

⁶ Irsyad Dhahri, Andi Kasmawati, and Bakhtiar, "Pemahaman Nilai-Nilai Dasar Profesi Dan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar," *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* Vol.12 No. (2017): 93.

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, "Tentang Pengelolaan Keuangan Desa".

⁸ Muhammad Mu'iz Raharja, *Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 3.

- 2) Menjadi suatu indikator dalam menetapkan jumlah biaya layanan yang hendak dibebankan kepada masyarakat.
- 3) Untuk mempertimbangkan dalam mencari sumber pendapatan lainnya.
- 4) Memberi wewenang kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan administrasi desa.
- 5) Memberikan arahan untuk pemerintah desa pada pengawasan maupun pelaksanaan pemerintah desa.
- 6) Sebagai gambaran kebijakan desa pada satu periode anggaran.
- 7) Pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan dengan perencanaan yang matang.

Kepala desa memegang kewenangan pengelolaan keuangan desa, juga mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang terpisahkan. Berdasarkan hal tersebut, kepala desa didukung oleh PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa). Kepala desa memiliki kewenangan, diantaranya:

- 1) Menentukan kebijakan mengenai pelaksanaan APBDes
- 2) Menentukan kebijakan pengelolaan barang milik desa
- 3) Menentukan tindakan atas pembebanan pengeluaran pada APBDes
- 4) Menetapkan PPKD
- 5) Menyetujui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran), serta DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan)
- 6) Menyetujui RAKDesa
- 7) Menyetujui SPP (Surat Permintaan Pembayaran).⁹

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban adalah aspek dalam mengelola dana desa. Basis kas adalah metode pencatatan keuangan desa, dimana transaksi dicatat ketika rekening kas desa menerima dan mengeluarkan kas. Kementerian Dalam

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, “Tentang Pengelolaan Keuangan Desa”.

Negeri mengelola sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengelola keuangan desa.¹⁰

Indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa menurut Putri Aulia adalah sebagai berikut¹¹:

- 1) Transparansi dan kejujuran informasi
- 2) Patuh dalam melaporkan dana desa
- 3) Membuat prosedur sesuai dengan peraturan yang ada
- 4) Memuat informasi yang cukup
- 5) Laporan yang disampaikan tepat waktu

2. Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran daerah merupakan bentuk desain rencana kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan daerah. Apabila mutu anggaran pemerintah daerah kurang, sehingga mutu fungsi pemerintah akan melemah. Anggaran daerah seharusnya bukan hanya memuat informasi pendapatan maupun pemakaian dana saja, namun harus menyuguhkan informasi terkait keadaan kinerja yang akan diwujudkan. Anggaran pemerintah harus dapat dijadikan sebagai acuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, rencana anggaran harus dapat dengan jelas mengidentifikasi tujuan kinerja.

Anggaran merupakan pedoman langkah pemerintah dalam pelaksanaan rencana pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan yang diukur pada satuan rupiah yang dibuat berdasarkan suatu klasifikasi dengan sistematis pada suatu periode, menurut PP No 71 Tahun 2010. Sehingga diperlukan kejelasan sasaran anggaran. Sesuai pemaparan Kenis dalam Anggreni, et al. bahwa kejelasan sasaran anggaran adalah ditetapkannya sasaran anggaran dengan spesifik dan jelas bertujuan supaya anggaran itu bisa dimengerti oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab terhadap capaian sasaran anggaran itu sendiri.¹²

¹⁰ Muhammad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Keuangan Desa Dan Aset Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 12.

¹¹ Putri Aulia, "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota," *JOMFEB* Vol.1 No.1 (2018): 7.

¹² Anggreni, Sumadi, and Andayani, "Pengaruh Kejelasan Anggaran, Audit Kinerja Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Penebel, Kabupaten

Sesuai dengan pendapat Mardiasmo dalam Hantono, et al. yang menyatakan anggaran sektor publik adalah alat ukur akuntabilitas terhadap dana publik yang dikelola dan penyelenggaraan kegiatan yang didanai melalui dana publik.¹³ Anggaran diperlukan untuk mengelola sumber daya ini dengan benar guna mencapai kinerja yang diinginkan masyarakat atau untuk membawa akuntabilitas kepada masyarakat. disebutkan bahwa ada 3 peranan krusial parlemen pada proses anggaran yakni memberdayakan pemerintah, mewakili kepentingan publik, maupun mengawasi capaian pemerintah.

Anggaran umumnya merupakan rencana keuangan yang menunjukkan pilihan kebijaksanaan dalam suatu periode di masa mendatang. Informasi yang tepat waktu, jelas, maupun objektif sangat dibutuhkan pada proses pembuatan anggaran. Suatu organisasi membutuhkan anggaran guna menjelaskan seluruh strategi yang akan dilaksanakan dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang.¹⁴ Sehingga, sasaran anggaran harus konkrit, jelas dan dipahami oleh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Penentuan tujuan spesifik akan lebih produktif yang akan membuat aparat/pegawai untuk bekerja dengan sebaik mungkin dengan maksud tujuan yang telah dikehendaki sebelumnya dapat tercapai serta hal itu akan memberi implikasi kepada perkembangan kinerja. Apabila anggaran yang disasarkan tidak jelas dapat menyebabkan pengelola anggaran akan merasa kebingungan, dan aparat dalam melakukan pekerjaannya merasa tidak puas sehingga membuat anggaran yang dikelola tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan.

Kejelasan sasaran anggaran sangat krusial untuk organisasi dalam memudahkan pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam aktivitas tertentu yang sudah dilakukan pada upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang sebelumnya sudah

Tabanan).” *HITA Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, Vol.2 No.3 (2021): 387.

¹³ Hantono et al., *Akuntansi Sektor Publik* (Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 40.

¹⁴ Anam Masruhin and M. Elfan Kaukab, “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo),” *Journal of Economic, Businss, and Engineering Universitas Sains Al-Qur’an Jawa Tengah* Vol.1 No.1, no. 1 (2019): 122.

ditentukan. Pengertian anggaran merupakan suatu rancangan rencana yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan mata uang selama periode waktu tertentu, yang harus diperhitungkan dalam suatu anggaran, khususnya kejelasan sasaran anggaran. Target yang diharapkan organisasi dapat direncanakan secara tepat dengan kejelasan sasaran anggaran. Anggaran yang didasarkan dengan jelas akan memberikan hasil terbaik dalam penggunaan anggaran dalam pemerintahan desa, dan otoritas desa akan memiliki cukup informasi untuk meramalkan masa depan secara efektif.¹⁵

Dalam penelitian Nicken Destriana, Jensen dan Meckling menjelaskan *Agency Theory* adalah suatu teori yang mengemukakan dalam suatu instansi harus ada pemisahan aset antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agent*) karena jika tidak dilakukan dapat menimbulkan masalah keagenan.¹⁶ Pada sektor publik hubungan keagenan tersebut dapat dilihat dalam penyusunan anggaran. Negara yang demokrasi memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau hubungan pemerintah desa dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.¹⁷ Teori keagenan (*agency theory*) menghubungkan antara pengelola dana dengan pemilik dana, jika pada proses pembuatan anggaran telah jelas diterima oleh pimpinan sehingga semua karyawan akan membuat anggaran itu guna menetapkan tujuan anggaran maupun bisa membuat target anggaran.

Untuk mewujudkan capaian yang diinginkan, aparat sangat dibantu oleh kejelasan sasaran anggaran yang mana dengan memahami sasaran anggaran, akan terwujud kinerja yang baik. Capaian kinerja akan berkaitan dengan motivasi, yang mana motivasi yang kuat akan membantu karyawan guna mewujudkan capaian yang diharapkan. Sasaran anggaran yang jelas harus bisa diwujudkan dan diukur pada masa mendatang,

¹⁵ Evi Ratna Yulastuti and Ikhsan Budi Riharjo, "Pengaruh Kompetensi Petugas, Pengendalian Internal Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Ilmu Riset Dan Akuntansi* Vol.9, no. 10 (2020): 3.

¹⁶ Nicken Destriana, "Pengaruh Debt to Equity Ratio, Dividen, and Faktor Non Keuangan Terhadap Agency Cost," *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* Vol.17 No. (2015): 125.

¹⁷ Riri Zelmianty, "Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia)," *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi* Vol.7 No.1 (2016): 13.

maka bisa memotivasi atasan lebih efisien dan efektif. Dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran adalah seberapa jauh organisasi menetapkan tujuannya secara jelas dan spesifik, kemudian anggaran dapat dilaksanakan dengan mudah terutama dalam mempertanggungjawabkan semua implementasi program kegiatan.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Yuliasuti dan Riharjo, indikator kejelasan sasaran anggaran antara lain sebagai berikut¹⁸:

- a. Tujuan yang spesifik
- b. Menetapkan kinerja yang dapat diukur
- c. Menetapkan target yang ingin dicapai
- d. Sasaran prioritas
- e. Tingkat kesulitan

3. Kompetensi Aparat Desa

Menurut Anam Masruhin dan M. Elfan Kaukab kompetensi merupakan karakteristik dari individu yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan dalam menjalankan pekerjaan tertentu. Guna menambah akuntabilitas, kompetensi aparat desa sangat dibutuhkan karena kompetensi adalah faktor yang bisa memberi pengaruh terhadap akuntabilitas.¹⁹ Lubis, et al. menjelaskan bahwa kompetensi merupakan penguasaan pada seperangkat keterampilan, nilai pengetahuan, sikap yang mengacu pada kinerja lalu ditunjukkan pada kebiasaan bertindak dan berpikir selaras dengan profesi.²⁰ Kompetensi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan, kemampuan, sikap yang menjadi sebuah acuan

¹⁸ Evi Ratna Yuliasuti and Ikhsan Budi Riharjo, "Pengaruh Kompetensi Petugas, Pengendalian Internal Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Ilmu Riset Dan Akuntansi* Vol.9, no. 10 (2020): 7.

¹⁹ Anam Masruhin and M. Elfan Kaukab, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)," *Journal of Economic, Business, and Engineering Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah* Vol.1, no. 1 (2019), 120.

²⁰ Lunariana Lubis, et al., "Analisa Kompetensi Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Sidotopo Kota Surabaya," *Jurnal PUBLICIANA* Vol.12 No1. (2019): 96.

untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaan yang dilaksanakan karyawan.²¹

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 46A mengartika kompetensi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai karakteristik diantaranya keterampilan, pengetahuan, dan tingkah laku yang dibutuhkan saat melaksanakan tugasnya, agar dapat profesional dalam mengemban tugasnya.²² Kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan sangat bergantung dari kesempurnaan dan kualitas pengelolaan aparat negara terkhusus PNS. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan tekad dan keahlian untuk menjalankan kewajiban dengan potensi yang dimiliki guna mewujudkan suatu tujuan perusahaan.

Sesuai pemaparan Spencer dalam Lubis, et al. ada 5 Karakteristik yang menciptakan kompetensi yakni :

- a. Pengetahuan, mencakup permasalahan administratif, teknis dan sistem.
- b. Keterampilan; mengacu kepada potensi individu dalam melaksanakan aktivitas tertentu.
- c. Konsep diri maupun nilai yang mengacu kepada nilai, sikap dan citra diri individu, misal kepercayaan individu atas keberhasilan pada situasi tertentu.
- d. Karakteristik pribadi; mengacu kepada karakteristik fisik maupun konsistensi pandangan pada informasi dan kondisi, misal pengendalian diri atau kompetensi agar tetap stabil.
- e. Motif, suatu dorongan dan kebutuhan psikologis lainnya yang memunculkan tindakan.²³

Menurut *Stewardship theory* keberadaan aparat desa saat menjalankan fungsi, tugas, serta tanggung jawabnya, akan memberikan seluruh kemampuannya serta menjunjung tinggi kejujuran dan integritas maka tercapainya kesejahteraan

²¹ Suriyanto, *Sinergitas Motivasi, Kompetensi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sebuah Instansi: Studi Kritis, Analisis Dan Praktis* (Surabaya: Global Aksara Pres, 2021), 23.

²² Keputusan Kepala BKN Nomor 46A Tahun 2003, "Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil" (2003).

²³ Lubis, Raharja, and Wahyudi, "Analisa Kompetensi Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Sidotopo Kota Surabaya." *Jurnal PUBLICIANA* Vol.12 No.1 (2019): 96–97.

masyarakat bisa diperoleh dengan optimal. *Stewardship theory* diciptakan atas dasar asumsi filosofis sifat kemanusiaan yang pada dasarnya bisa dipercaya, bekerja penuh tanggung jawab dan mempunyai kejujuran pada orang lain. *Stewardship theory* memandang aparat desa merupakan kepercayaan guna bertindak sebaik mungkin untuk kepentingan publik ataupun *stakeholder* khususnya.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang lemah terhadap pengelolaan kompetensi individunya akan mengakibatkan kinerja organisasi menjadi kurang optimal. Dalam organisasi sektor publik hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.²⁴ Maka untuk mengelola keuangan desa, aparat desa yang berkaitan harus mempunyai SDM yang berkompentensi, yang ditunjang dengan latar belakang pendidikann yang baik maupun pengalaman dalam bidang keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pebriyanto dan Sumadi, indikator kompetensi aparat desa antara lain sebagai berikut²⁵:

- a. Pemahaman
- b. Keahlian teknis
- c. Pelatihan
- d. Inisiatif dalam bekerja
- e. Kode etik kepegawaian

4. Kepemimpinan

Leadership adalah kata lain dari kepemimpinan yang berasal dari Bahasa Inggris. Kata ini bermula dari *lead* yang artinya memimpin, dari kata kerja *to lead* yang artinya orang yang menjadi pemimpin, *leadership* artinya kepemimpinan. Menurut Robbin & P Stephen dalam Marjaya & Pasaribu menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan potensi individu guna memberi pengaruh pada individu lainnya ataupun sekelompok individu dalam mewujudkan tujuan yang telah

²⁴ Alfian Rosiadi, *Competency-Based Human Resource Management: Manajemen Aparatur Sipil Di Indonesia* (Jawa Barat: Guepedia, 2019), 16.

²⁵ I Wayan Pebriyanto and Ni Komang Sumadi, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Se-Kecamatan Sukawati)," *HITA Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia* Vol.2, no. 4 (2021): 376.

diprogramkan sebelumnya.²⁶ Sutarto Wijono menjelaskan bahwa sebuah usaha dari pemimpin agar bisa merealisasikan tujuan organisasi. Maka, pemimpin diharap bisa mendukung, memberikan pengaruh, dan memberi motivasi supaya pengikut itu mau melaksanakan dengan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki baik secara kelompok atau individual.²⁷

Mangunhardjana menjelaskan bahwasanya kepemimpinan merupakan serangkaian aktivitas guna mempengaruhi orang-orang yang dipimpin guna mengarahkan mereka mewujudkan sasaran maupun tujuan lembaga yang sebelumnya sudah ditentukan.²⁸ Kepemimpinan merupakan sikap memandu, menuntun, membimbing, memunculkan motivasi serta terus menjaga dan menjalin secara baik komunikasi yang positif, dan memberi pengaruh para pengikut kepada cara yang ditujunya, yang selaras dengan perencanaan yang telah ditetapkan bersama.²⁹

Dari definisi di atas, kepemimpinan adalah hubungan di mana satu orang memiliki kekuatan untuk membujuk orang lainnya untuk mencapai tujuan dengan bekerja sama antara pemimpin dan bawahan. Seseorang yang memiliki wewenang untuk memberikan tugas dikenal sebagai seorang pemimpin.

Kepala desa merupakan unsur pelaksana pemerintah desa diharapkan dapat berkoordinasi dan memimpin dalam mengelola keuangan desa lalu memberikan laporan pertanggungjawaban secara akuntabel dan transparan. Transparansi dan akuntabilitas menyebutkan bahwa mereka memegang kepercayaan masyarakat yang harus mempertanggungjawabkan kinerja pada publik dan memberikan informasi dengan cara terbuka terkait laporan pengelolaan dana desa. Teori agensi menjelaskan semakin bertambahnya transparansi dan pertanggungjawaban dalam mengelola dana

²⁶ Indra Marjaya and Fajar Pasaribu, "Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai," *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan* Vol.2 No.1 (2019): 131.

²⁷ Sutarto Wijono, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Organisasi* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), 4.

²⁸ Mangunhardjana, *Kepemimpinan Dasar-Dasar Teori Dan Praktinya* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021), 2.

²⁹ Suwatno, *Pemimpin Dan Kepemimpinan: Dalam Organisasi Publik Dan Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 5.

desa dapat menurunkan adanya *information asymmetry*. Dengan menurunnya *information asymmetry* sehingga memungkinkan kecilnya masalah yang timbul dalam pengelolaan dana desa.

Fungsi kepemimpinan menurut Krech dalam Sutarto Wijono menyebutkan ada empat belas fungsi, diantaranya sebagai berikut³⁰:

- a. *The leader as executive*, menjadi koodinator puncak dari kegiatan kelompok dan menjadi pengawas pelaksana kebijakan.
- b. *The leader as planner*, melaksanakan beberapa langkah yang ditentukan dan akan diwujudkan oleh suatu kelompok.
- c. *The leader as policy maker*, menciptakan kebijakan maupun tujuan pada suatu kelompok.
- d. *The leader as expert*, mempunyai keahlian untuk sumber informasi yang bisa dipercaya anggotanya.
- e. *The leader as external group representative*, sebagai juru bicara maupun menghubungkan komunikasi bagi satu kelompok.
- f. *The leader as controller of internal relations*, sebagai pengawas hubungan internal yang ada dalam suatu kelompok atau organisasi.
- g. *The leader as purveyor or reward and punishment*, mempunyai kekuasaan dalam pengendalian anggotanya.
- h. *The leader as arbitrator and mediator*, memiliki kendali atas permasalahan yang terjadi pada kelompoknya.
- i. *The leader as exemplar*, merupakan sebuah model perilaku untuk anggotanya.
- j. *The leader as symbol of the group*, menetapkan arah kebijakan rasional maupun membuat kelompok menjadi terarah dan jelas.
- k. *The leader as substitute for individual responsibility*, memiliki kewenangan untuk mengganti personil anggotanya untuk kepentingan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan.
- l. *The leader as ideologis*, sebagai sumber yang dapat dipercaya .
- m. *The leader as father figure*, menjadi tempat menampung berbagai argumen secara positif bagi anggotanya.

³⁰ Sutarto Wijono, 33-32.

- n. *The leader as scapegoat*, sebagai suatu target yang dapat menimbulkan agresi dan permusuhan bagi suatu kelompok.

Beberapa konsep yang memiliki hubungan kuat dengan kepemimpinan adalah³¹:

- a. Kredibilitas, jika tidak adanya kredibilitas maka akan sulit menjadi pemimpin, karena terdapatnya kredibilitas pemimpin mendapat keyakinan dan kepercayaan.
- b. Integritas, membuat kepemimpinan menjadi lengkap yang termasuk kesatuan perbuatan dan perkataan.
- c. Kedudukan, merupakan sekelompok tanggung jawab, wewenang, tugas individu.
- d. Jabatan, merupakan pekerjaan yang sudah melembaga pada sebuah instansi ataupun sudah membudaya di masyarakat.
- e. Wewenang, merupakan sebuah bentuk kekuasaan, sering kali dipakai dengan lebih leluasa dalam menunjuk kompetensi manusia mempergunakan kekuasaan sebagai ciri-ciri dan hasil misalnya gelar ataupun pengetahuan.
- f. Tanggung Jawab, merupakan hal yang telah menjadi kewajiban pemegang jawaban agar menerima diri menjadi penyebab utama terkait kejadian tertentu buruk ataupun baik, benar atau salah.
- g. Kewibawaan, merupakan berbagai kelebihan yang dimiliki individu maka individu lain bisa memenuhi keinginannya dan tidak ada tekanan saat melaksanakan aktivitas guna mewujudkan tujuan.
- h. Kemampuan, merupakan totalitas kekuatan yang dimiliki individu dalam melaksanakan aktivitas tertentu agar mewujudkan tujuan.
- i. Pengaruh, merupakan tindakan perilaku yang memunculkan perubahan perilaku dan sikap individu ataupun kelompok lain.

³¹ Rendy Adiwilaga, *Kepemimpinan Pemerintah Indonesia: Teori Dan Praktik* (Sleman: DEEPUBLISH, 2018), 29-31.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pramita dan Suhaeli indikator kepemimpinan antara lain sebagai berikut³²:

- a. Peran pemimpin memberikan kebebasan bawahan menyampaikan pendapat
- b. Mendelegasikan wewenang
- c. Menciptakan suasana kerja yang kondusif

5. Komitmen Organisasi

Menurut Moorhead dan Griffin dalam Rizal dan Hermanto, komitmen organisasi merupakan sikap yang memperlihatkan seberapa jauh seseorang terikat dan mengenal organisasi. Seseorang berkeinginan kuat untuk berada di organisasi tersebut. Komitmen organisasi yang kuat memberi pengaruh pada kinerja pegawai yang terdapat di dalamnya, kinerja pegawai akan lebih bertanggung jawab dan profesional. Dan dalam titik ekstrim anggota organisasi walaupun tidak disuruh, akan bisa memahami apakah yang harus dilaksanakan berikutnya.³³

Komitmen organisasi menurut Arifin dalam Haura, et al. adalah dorongan yang timbul dari seseorang guna melakukan suatu hal untuk menambah kesuksesan organisasi selaras dengan keinginan yang disesuaikan kepada tujuan yang ingin dicapai atau lebih mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan individu.³⁴ Aparat desa yang mempunyai komitmen yang baik pada organisasi cenderung akan memperlihatkan mutu yang positif, lebih totalitas saat bekerja terlebih dalam pengelolaan dana desa.

Dari definisi komitmen organisasi tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya komitmen organisasi merupakan

³² Yulinda Devi Pramita and Dahli Suhaeli, "Penerapan Standar Pelaporan Keuangan, Kepemimpinan, Kompetensi, Peran Audit Internal Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Pada Kualitas Informasi Laporan Keuangan," *University Research Colloquium* ISSN 2407-9189, Proceeding 6th URECOL 2017: Seri Humaniora, Sosial dan Agama (2017): 119.

³³ Nadia Athiqotul Amalia Rizal and Suwardi Bambang Hermanto, "Peran Komitmen Organisasi Memediasi Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* Vol.8 No.1 (2019): 4.

³⁴ Ghina Adha Haura, et al., "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Kinerja Aparatut Pemerintah Daerah Terhadap Good Governance Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Paa SKPK Di Kota Langsa)," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* Vol.3 No.1 (2019): 38.

kemampuan dan keinginan individu tertentu yang memiliki keterikatan terhadap organisasi serta mengusahakan terwujudnya tujuan organisasi secara baik, dan loyalitas seseorang itu agar tetap ada dalam organisasi. Komitmen organisasi bisa memberikan pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Komitmen membuktikan dukungan dan keyakinan yang kuat pada sasaran dan nilai yang hendak diwujudkan organisasi.

Mayer dan Allen dalam Yusuf dan Syarif mengemukakan bahwa terdapat komponen model dari komitmen organisasi, meliputi³⁵:

a. Komitmen Afektif (*Affective Commitment*)

Adalah keinginan yang cenderung kuat dari individual agar tetap bekerja di organisasi. Komitmen afektif muncul saat karyawan akan menjadi bagian dari anggota organisasi dikarenakan memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan organisasi.

b. Komitmen Berkelanjutan (*Continuance Commitment*)

Adalah keinginan guna berupaya untuk kesuksesan organisasi sebab mengakumulasikan *reward* ekstrinsik maupun manfaat yang bisa diperoleh. Komitmen akan ada jika karyawan tetap bertahan pada organisasi dikarenakan suatu alasan, umumnya hal yang sifatnya memberi keuntungan.

c. Komitmen Normatif (*Normative Commitment*)

Kepercayaan karyawan yang kuat untuk tetap tinggal di organisasi karena memiliki hutang budi. Komitmen ini muncul dari dalam diri karyawan yang mempertahankan keanggotaannya pada sebuah organisasi sebab mempunyai kesadaran bahwa ia mempunyai kewajiban guna melaksanakannya.

Dalam *stewardship theory* pegawai yang bekerja dalam organisasi akan bekerja untuk mencapai tujuan bersama.³⁶ Aparat desa harus memiliki komitmen organisasi untuk mendorong kepercayaan dan menerima tujuan-tujuan organisasi serta tetap berada diorganisasi tersebut. Komitmen organisasi dijadikan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini sebab

³⁵ Ria Mardiana Yusuf and Darman Syarif, *Komitmen Organisasi: Definisi, Dipengaruhi Dan Mempengaruhi* (Makassar: Penerbit Nas Media Pustaka, 2018), 20-21.

³⁶ Luthfiani and Asmuny, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Lombok Tengah."

menurut teori *stewardship* terdapat hubungan timbal balik antara aparat pemerintahan dengan masyarakat yang mana kepentingan pemerintah desa yakni merealisasi visi dan misi yang sudah diperjanjikan pada masyarakatnya serta tidak mementingkan urusan pribadinya. Sementara kepentingan masyarakat merupakan kebutuhan nyata mengenai sarana prasarana baik fisik ataupun non fisik yang memberi manfaat untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Dipertemukannya kedua kepentingan itu menjadi komitmen yang dimufakati sebagai tanggung jawab serta amanah bersama untuk menciptakan pemerintah desa yang akuntabel.

Terdapat empat unsur yang memberi pengaruh komitmen aparat pada organisasi menurut Sopiah dalam Jufrizen, antara lain³⁷:

- a. Karakteristik individu seperti pencapaian pendidikan, usia, pengalaman dalam bekerja, jenis kelamin dan sebagainya.
- b. Karakteristik pekerjaan, seperti tantangan selama bekerja, ruang lingkup pekerjaan, kesulitan dalam bekerja, konflik peran di tempat kerja, dan sebagainya.
- c. Karakteristik struktur, misalnya kecil ataupun besarnya organisasi, kehadiran serikat pekerja, bentuk organisasi serta tingkat pengontrolan yang dilaksanakan organisasi pada pegawai.
- d. Pengalaman kerja, pengalaman kerja pegawai sangatlah memberi pengaruh pada tingkat komitmen pegawai dalam organisasi.

Menurut Alminanda dan Marfuah, indikator komitmen organisasi adalah sebagai berikut³⁸:

- a. Afektif
- b. Keberlanjutan
- c. Normatif

³⁷ Jufrizen, *Komitmen Organisasi Dan Kinerja Karyawan Dengan Etika Kerja Sebagai Variabel Moderating* (Medan: UMSU Press, 2021), 20.

³⁸ Putri Alminanda and Marfuah, "Peran Komitmen Organisasi Dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi* Vol.16 No. (2018): 124.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa beserta faktor lain yang berkaitan, antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Evi Marlina, dkk (2021)	Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim	Menyatakan bahwa kepemimpinan, kompetensi dan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelola dana desa.	Meneliti variabel independen berupa kepemimpinan dan kompetensi.	Variabel independen yang diteliti berupa kejelasan sasaran anggaran, meneliti variabel moderasi berupa komitmen organisasi dan teori yang digunakan.
2	I Made Agus Suma Arta dan Ni Ketut Rasmini (2019)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Seririt Kabupaten	Meneliti variabel independen berupa kejelasan sasaran anggaran.	Variabel independen yang diteliti berupa kompetensi aparat desa dan kepemimpinan dan meneliti variabel moderasi berupa komitmen organisasi.

			Buleleng.		
3	Zulkifli, dkk (2021)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim	Menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dipengaruhi oleh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi.	Meneliti variabel independen berupa kompetensi aparat desa.	Variabel independen yang diteliti berupa kejelasan sasaran anggaran dan kepemimpinan, komitmen organisasi menjadi variabel moderasi.
4	Baiq Mira Luthfiani dan Thatok Asmony (2020)	Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah	Menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa dan partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun aplikasi siskeudes dan kepatuhan pajak bendaharaw	Meneliti variabel independen berupa kompetensi perangkat desa.	Variabel independen yang diteliti berupa kejelasan sasaran anggaran dan kepemimpinan, meneliti variabel moderasi berupa komitmen organisasi.

			an desa berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.		
5	Kadek Danu Dwika Riyatna dan Gayatri (2021)	Faktor yang Memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Denpasar Utara	Menyatakan bahwa variabel kepemimpinan kepala desa dan kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Meneliti variabel independen berupa kepemimpinan dan kompetensi perangkat desa	Variabel independen yang diteliti berupa kejelasan sasaran anggaran dan variabel moderasi yang diteliti berupa komitmen organisasi.
6	Muhammad Hafiz (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan dan	Menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah, ketaatan pada peraturan perundang-undangan	Meneliti variabel independen berupa kompetensi aparatur dan kejelasan sasaran anggaran. Meneliti	Variabel independen yang diteliti berupa kepemimpinan dan tidak meneliti variabel kinerja manajerial

	Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi dan Kinerja Manajerial sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)	dan kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Komitmen organisasi dan kinerja manajerial memperkuat pengaruh kompetensi aparatur pemerintah, ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	variabel moderasi berupa komitmen organisasi.	sebagai variabel moderasi.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------

Tabel 2.2 Pemilihan Variabel Penelitian

No	Variabel	Alasan Pemilihan
1	Variabel Independen a. Kejelasan Sasaran Anggaran	Diambil dari penelitian terdahulu yang dilakukan Arta & Rasmini dan adanya ketidak tepatan pemberian BLT-DD di

		Desa Lau Kec.Dawe.
	b. Kompetensi Aparat Desa	Diambil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Evi Marlina, et.al dan adanya dana desa yang digunakan melewati batas <i>cutoff</i> 31 Desember di Desa Rejosari dan masih terdapat aparat desa yang berlatang belakang SLTP.
	c. Kepemimpinan	Diambil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Evi Marlina, et.al dan adanya kasus penyelewengan dana desa oleh mantan kepala desa di Kec Dawe pada tahun 2021.
2	Variabel Dependen a. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Karena kasus penyelewengan dana desa yang menyeret mantan kepala desa Lau dan Tergo yang meyebabkan kerugian negara ratusan juta hingga milyaran rupiah maka peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ada di Kec. Dawe.
3	Vaiabel Moderasi a. Komitmen Organisasi	Diambil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hafiz dan ada kesanggupan individu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dipercayakan di dalam organisasi.

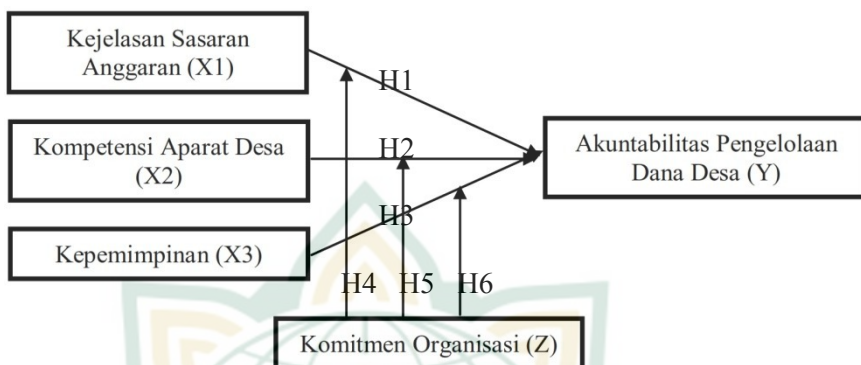
Sumber: Diolah Peneliti, 2022

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan *agency theory* aparat desa selaku *agent* yang diberikan wewenang untuk mengelola dana desa harus melakukan adanya pemisahan aset pribadinya dengan dana desa yang dikelola agar menciptakan pengelolaan dana desa yang akuntabel dimana sasaran anggaran dana desa ditetapkan secara jelas, selain itu pemimpin harus mampu mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi agar tidak terjadi *information asymmetry*. Didalam *stewardship theory* mengasumsikan seseorang perlu memiliki motivasi dan komitmen tidak hanya untuk kepentingan individu melainkan memprioritaskan pada kepentingan organisasi dan memberikan seluruh kemampuan kinerjanya guna tujuan organisasi dapat tercapai, sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat pula. Oleh karena itu, berdasarkan teori

dan penelitian terdahulu yang masih relevan maka dapat ditarik sebuah kerangka berfikir berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Sumber : Diolah Peneliti, 2021

Gambar 2.1 diatas terlihat bahwa terdapat hubungan antara Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparat Desa dan Kepemimpinan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan yang didasarkan pada rumusan masalah penelitian yang bersifat sementara dan termuat dalam suatu pernyataan.. Hipotesis disebut sementara sebab jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori.³⁹

1. Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kejelasan sasaran anggaran yaitu seberapa jauh sasaran anggaran ditetapkan dengan jelas dan spesifik yang bertujuan agar orang yang bertanggung jawab dapat dimengerti anggaran tersebut. Proses penyusunan anggaran dapat menimbulkan tingkah laku pelaksana anggaran melakukan kesenjangan anggaran yang disebabkan oleh perilaku negatif pada pelaksana anggaran. Dengan meningkatnya kejelasan anggaran maka pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel.⁴⁰ Penelitian

³⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan* (Jakarta: KENCANA, 2014):130.

⁴⁰ Rusdiana and Nasihudin, *Akuntabilitas: Kinerja Dan Pelaporan Penelitian*, cetakan pertama (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2018):66.

sebelumnya yang dilakukan oleh Arta dan Rasmini⁴¹, Yuliasuti & Riharjo⁴² dan Suryani & Suprasto⁴³ menyimpulkan bahwa jelasnya sasaran dari anggaran memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurji, et al.⁴⁴ menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari apa yang telah diuraikan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: *Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa*

2. Kompetensi Aparat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi adalah suatu kemampuan, pengetahuan dan sikap seseorang yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan yang dikerjakannya. Program dana desa merupakan kebijakan fiskal yang bersifat otonom dalam pengelolaannya, dimana aparat desa sebagai pengelola dana desa diberikan wewenang dalam hal pemanfaatan.⁴⁵ Kinerja aparat desa akan dipengaruhi oleh tingkat kompetensi aparat desa. Kerap ditemui banyak hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, salah satunya dari faktor sumber daya manusia (SDM). Jika kompetensi yang dimiliki aparat desa tinggi maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, begitupun sebaliknya. Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Dewi

⁴¹ Arta and Rasmini, "Pengaruh Kejelasan Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa."

⁴² Evi Ratna Yuliasuti and Ikhsan Budi Riharjo, "Pengaruh Kompetensi Petugas, Pengendalian Internal Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Ilmu Riset Dan Akuntansi* Vol.9, no. 10 (2020): 1.

⁴³ Ni Made Suryani and Herkulanus Bambang Suprasto, "Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.31 No. (2021): 2011.

⁴⁴ Nurji, et al., "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.29 No. (2019): 614–615.

⁴⁵ Muhammad Amir Arham, *Desentralisasi Dan Pengelolaan Perekonomian Daerah* (Sleman: CV Budi Utama, 2019):62.

dan Gayatri⁴⁶, Yuliasuti & Riharjo⁴⁷, Pebriyanto dan Sumadi⁴⁸, menyimpulkan kompetensi perangkat desa memiliki pengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Luthfiani dan Asmuny⁴⁹ dan Burhanudin, et al.⁵⁰ menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.*

3. **Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memimpin, mempengaruhi, dan mengarahkan seseorang agar timbul pengakuan, kepatuhan, ketaatan, serta memiliki kemampuan dan kesadaran untuk melakukan kegiatan guna mencapai tujuan.⁵¹ Kepala desa bertindak sebagai pemimpin di pemerintah desa yang mana dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin harus mampu memberikan pengaruh dan motivasi kepada anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi salah satunya adalah mensejahterakan masyarakat. Oleh karena

⁴⁶ Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi and Gayatri, “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.26 No. (2019): 1269.

⁴⁷ Evi Ratna Yuliasuti and Ikhsan Budi Riharjo, “Pengaruh Kompetensi Petugas, Pengendalian Internal Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal Ilmu Riset Dan Akuntansi* Vol.9, no. 10 (2020): 1.

⁴⁸ I Wayan Pebriyanto and Ni Komang Sumadi, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Sekelamatan Sukawati),” *HITA Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia* Vol.2, no. 4 (2021): 376.

⁴⁹ Luthfiani and Asmuny, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Lombok Tengah.”

⁵⁰ Burhanudin, Andi Syarifuddin, and Iqbal, “Analisis Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa,” *MM Journal* Vol.1 No.1 (2020): 53.

⁵¹ Lilis Yuaningsih, *Kepemimpinan Sektor Publik* (Serang: BINTANG VISITAMA PUBLISHER, 2016):107.

itu kepemimpinan dari kepala desa sangat berpengaruh dalam suatu organisasi. Penelitian sebelumnya oleh Evi Marlina, et al.⁵² dan Dewi dan Gayatri⁵³, yang menyimpulkan bahwa kepemimpinan berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

4. Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi

Untuk mencapai hasil terbaik, aparat desa harus berkomitmen penuh terhadap pelaksanaan proses penganggaran.⁵⁴ Jika seseorang didedikasikan untuk tujuan anggaran yang jelas, itu akan berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pada pemerintah desa, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan termotivasi untuk menciptakan sasaran anggaran yang jelas sehingga pengelolaan dana desa menjadi akuntabel. Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Hafiz⁵⁵ dan Nurji, et al⁵⁶ yang menyimpulkan bahwa komitmen organisasi memperkuat hubungan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Dewi, et al⁵⁷ menyimpulkan

⁵² Marlina, Rahmayanti, and Futri, "Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa Di Kecamatan Rakit Kulim."

⁵³ Dewi and Gayatri, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa."

⁵⁴ Kadek Fitria Dewi, et al., "Pengaruh Budaya Organisasi, Pengendalian Internal Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Pada Akuntabilitas Kinerja SKPD Kabupaten Gianyar Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* Vol.22 No. (2017): 26.

⁵⁵ Hafiz, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating."

⁵⁶ Nurji, et al., "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating."

⁵⁷ Kadek Fitria Dewi, et al., "Pengaruh Budaya Organisasi, Pengendalian Internal Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Pada Akuntabilitas Kinerja SKPD

bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja. Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4: *Komitmen organisasi memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa*

5. Kompetensi Aparat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi

Dalam melaksanakan pertanggungjawaban atas pekerjaan yang telah dilakukan, suatu organisasi atau perusahaan sangat membutuhkan seorang yang berkompeten. Karena apabila yang mengelola aparat desa yang berkompeten akan berdampak pada baiknya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perusahaan atau agensi manapun pasti ingin anggotanya berkomitmen pada organisasi. Komitmen organisasi yang sangat baik pada aparat desa maka akan mencerminkan seseorang merasa mengenal dan terikat dengan organisasinya serta mendorong organisasi untuk cepat dan tepat mencapai keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan.⁵⁸ Akan tetapi, jika aparat desa memiliki komitmen yang rendah, maka dalam mencapai tujuan organisasi juga akan rendah. Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Wardhana, et al.⁵⁹ dan Hafiz⁶⁰ menyimpulkan komitmen organisasi memperkuat hubungan kompetensi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jika dihubungkan dengan penelitian ini apabila kompetensi yang dimiliki aparat desa yang

Kabupaten Gianyar Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi,” *Jurnal Buletin Studi Ekonomi* Vol.22 No.1 (2017): 21.

⁵⁸ Nadia Athiqotul Amalia Rizal and Suwardi Bambang Hermanto, “Peran Komitmen Organisasi Memediasi Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa,” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* Vol.8 No.1 (2019): 4.

⁵⁹ Gede Ari Surya Wardhana, Ni Ketut Rasmini, and Ida Bagus Putra Astika, “Pengaruh Akuntansi Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi,” *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* Vol.4 No.9 (2015): 571.

⁶⁰ Hafiz, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating.”

mencukupi dan diperkuat oleh komitmen organisasi yang tinggi akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi. Dengan kinerja instansi yang akuntabel maka akan meningkatkan akuntabilitas aparat desa dalam mengelola dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Harahap, et al.⁶¹ menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak mampu memoderasi kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5: *Komitmen organisasi memoderasi hubungan antara kompetensi aparat desa dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa*

6. **Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi**

Pentingnya aspek akuntabilitas diterapkan dalam rangka pelaksanaan secara propektif terkait dengan hasil karakteristik dan tindak lanjut penggunaan yang digunakan oleh pimpinan. Kepemimpinan adalah suatu usaha dari seorang pemimpin untuk merealisasikan tujuan organisasi.⁶² Karena seorang pemimpin memiliki dampak yang begitu besar terhadap kinerja organisasinya, ia harus memanfaatkan gaya kepemimpinan untuk mengelola anggotanya. Kepala desa sebagai pimpinan tertinggi dalam pemerintah desa harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perangkatnya dan membangun rasa keterikatan terhadap organisasi. Pemimpin yang mempunyai rasa keterikatan dalam memberikan tanggung jawabnya kepada organisasi, dia akan memberikan motivasi dan tanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Pratama, et al.⁶³

⁶¹ Firhan Baihaqi Harahap, Afrah Junita, and Tuti Meutia, “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat Dan Perilaku Kepemimpinan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Komitmen Pada Tujuan Sebagai Variabel Moderasi,” *Jurnal Samudra Ekonomika* Vol.4 No.1 (2020): 170.

⁶² Wijono, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Organisasi*. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), 4.

⁶³ Fauza Pratama, Winda Ardiani, and Rizki Putra, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transaksional Dan Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel

menyimpulkan komitmen organisasi dapat memoderasi gaya kepemimpinan transaksional dan gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Harahap, et al.⁶⁴ menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak mampu memoderasi perilaku pemimpin terhadap pengelolaan dana desa. Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H6: *Komitmen organisasi memoderasi hubungan antara kepemimpinan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa*



Moderating Pada PT. Bangun Mitra Abadi Medan,” *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis* Vol.5 No.2 (2021): 40.

⁶⁴ Harahap, Junita, and Meutia, “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat Dan Perilaku Kepemimpinan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Komitmen Pada Tujuan Sebagai Variabel Moderasi.”